

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Implementasi anggaran berbasis kinerja di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat telah dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dari data Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Secara umum capaian kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019-2021 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari besarnya tingkat capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan. Sesuai pengukuran kinerja, dari sebanyak 15 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, rata-rata capaian kerjanya tinggi di tahun 2020. Namun demikian tetap diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut terhadap proses perencanaan program dan penganggaran dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, pada beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) ada penurunan yang terdampak dari terjadinya Pandemi Covid-19.

Penganggaran berbasis kinerja dapat memudahkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja dan kegiatan atau program yang dilakukan kepada

publik. Penyusunan sistem pengukuran kinerja memberikan gambaran yang mudah tentang pencapaian setiap target yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Untuk itu, perlunya anggaran berbasis kinerja diterapkan pada setiap instansi pemerintah.

5.2 Saran

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diharapkan memberikan pelatihan-pelatihan berkaitan sistem dan program penganggaran berbasis kinerja. Hal ini guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi ASN guna mencapai suatu tujuan bagi instansi tersebut. Namun penelitian ini belum mampu menganalisis efektivitas pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintah daerah.

